

BAB II

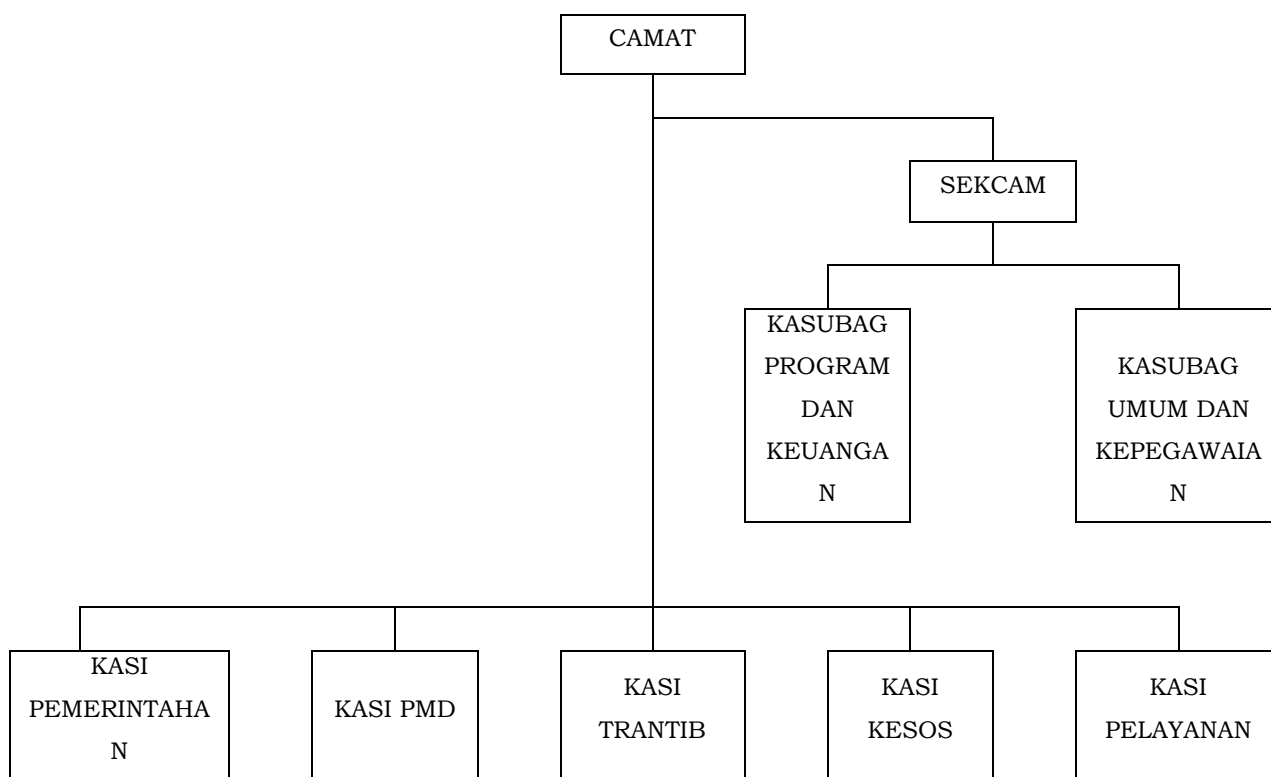
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gabus

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Gabus terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gabus

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.

Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat

		<p>pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</p>
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permasyarakatan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gabus, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Gabus berjumlah 20 orang, terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Gabus	1	1	5	2	5	3	17	
	- Camat		1	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1							
	- Kasubag Program & Keu			1					
	- Kasubag Umum & Kepeg				1				
	- Kasi PMD			1					
	- Kasi Trantib			1					
	- Kasi Kesos				1				
	- Kasi Pelayanan			1					
	- Kasi Pemerintahan			1					
	- Staf Pemerintahan					1			
	- Staf Seksi Tramtib						1		
	- Staf Pelayanan						1		
	- Staf Subbag Program dan Keuangan					1	1		
	- Staf Subbag Umum & Kep					1			
	- Satpol PP					2			

Tenaga Non PNS / Tenaga Harian Lepas

No	Uraian	L	P	Jumlah	%
1	Operator E KTP		2	2	
2	Petugas Kebersihan	1	0	1	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gabus, 2017

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gabus	1		5	1		2	5	4	1	1	12	8
	- Camat										1		
	- Sekcam									1			
	-Kasubag Program & Keu							1					
	-Kasubag Umum & Kepeg								1				
	- Kasi PMD							1					
	- Kasi Trantib							1					
	- Kasi Kesos								1				
	-Kasi Pelayanan							1					
	-Kasi Pemerintahan							1					
	-Staf Pemerintahan			1									
	-Staf Seksi Tramtib								1				
	-Staf Seksi Pelayanan								1				
	-Staf Subbag Progran & Keu			1			1						
	-Staf Subbag Umum & Kep			1									
	- Satpol PP			2									
	Tenaga Harian Lepas												
	Operator E KTP				1		1						
	Tenaga Kebersihan	1											

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gabus, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.5
Sarana Prasarana Kecamatan
Tahun 2013 - 2016

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi saat ini	Keterangan
1.	Kantor Kecamatan	1	unit	Baik	
2.	Aula Kecamatan	1	unit	Baik	
3.	Rumah Dinas Camat	1	unit	Baik	
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	unit	Baik	
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	6	unit	5 Baik, 1 rusak	
6.	Pompa Air	1	unit	Baik	
7.	Pendingin Ruangan (AC)	3	buah	Baik	
8.	Mesin Ketik	2	buah	Rusak	
9.	Komputer	3	set	Baik	
10.	Laptop	3	buah	Baik	
11.	Note book	2	buah	Baik/rusak	
12.	Printer	6	buah	3 Baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
13.	LCD Proyektor	1	unit	Baik	
14.	Kursi kerja	30	buah	Baik	
15.	Papan data	2	buah	Baik	
16.	Kamar mandi	4	buah	Baik	
17.	Meja Kerja	3	buah	Baik	
18.	Meja Kerja Pejabat	10	buah	Baik	
19.	Meja Kursi Tamu	1set	buah	Baik	
22.	Televisi	3	buah	Baik	
23.	Loudspeaker	1	buah	Baik	
24.	Pesawat HT	1	buah	Baik	
25.	Filling Cabinet	8	buah	Baik/Rusak	
26.	Rak arsip	4	buah	Rusak	
27.	Lemari kayu	8	buah	Baik/rusak	
28.	Lemari besi	1	buah	Baik	
29.	Meja panjang	2	buah	rusak	
30.	Meja Tulis	21	buah	Baik/rusak	
31.	Meja Rapat	4	buah	baik	
32.	Kursi lipat	30	buah	baik	
33.	Kipas Angin	5	buah	Baik	
34.	Papan Nama Kecamatan	1	buah	Baik	
35.	Papan Pengumuman	1	buah	Baik	
36.	Genset	1	buah	Rusak	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gabus, 2016

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 7 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 5 unit dikarenakan 3 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 2 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Gabus saat ini sebanyak 3 unit dengan 3 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Gabus saat ini sebanyak 3 unit dalam kondisi baik dan 2 note book 1 kondisi baik dan yang 1 kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 8 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Gabus saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Jumlah meja rapat di Kecamatan Gabus saat ini sebanyak 4 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja rapat sebanyak 4 unit lagi untuk kebutuhan rapat-rapat.

Jumlah kursi lipat di Kecamatan Gabus saat ini sebanyak 30 buah dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi lipat sebanyak 70 unit lagi untuk memenuhi kebutuhan rapat-rapat.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Gabus saat ini sebanyak 3 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 7 unit lagi untuk ruangan yang belum terdapat AC.

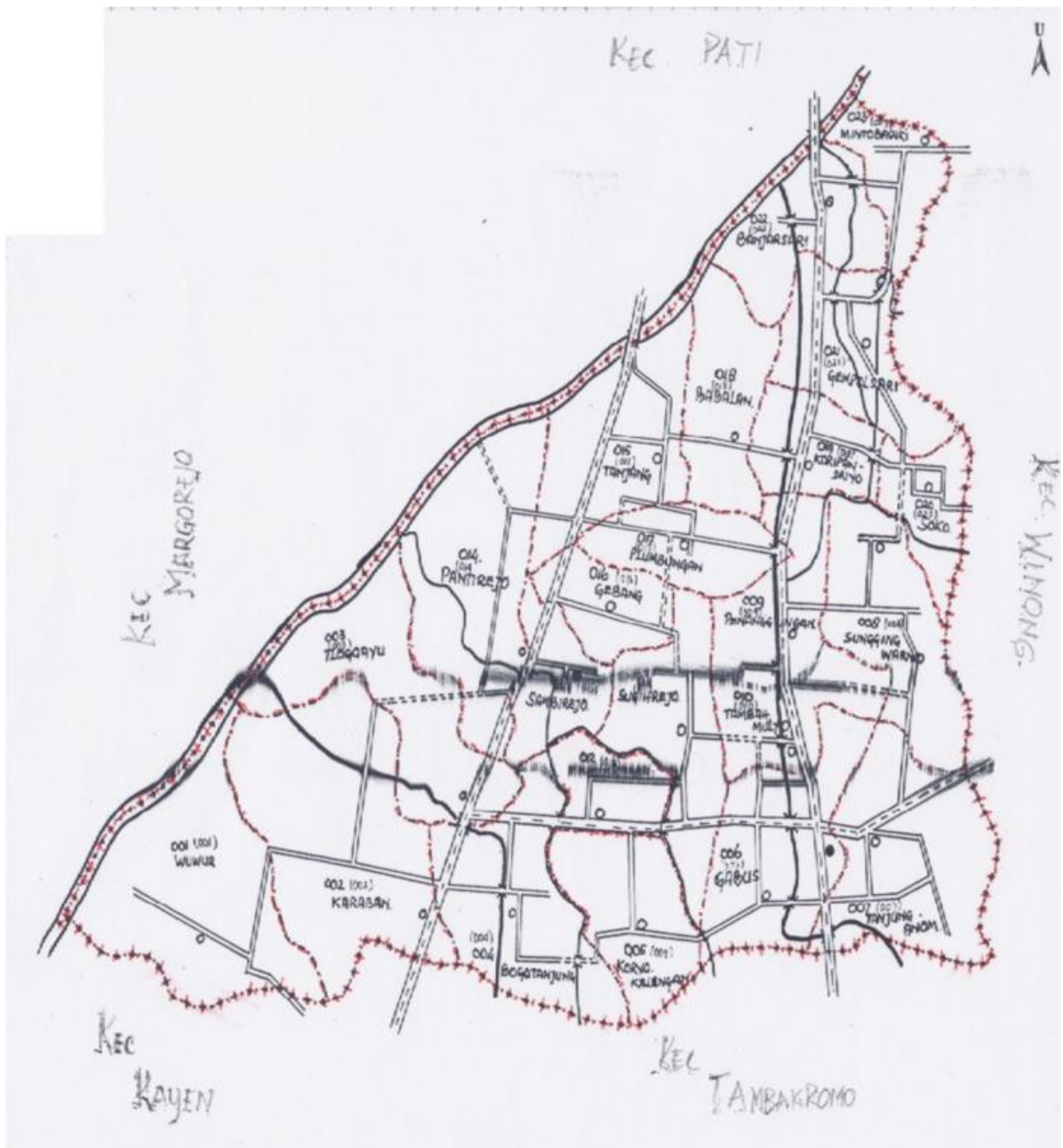
Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Gabus saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Gabus

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Gabus merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.931 Ha. Secara administratif Kecamatan Gabus dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kec. Tambakromo dan Kec. Kayen Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Winong Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati



Peta Kecamatan Gabus

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Gabus dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.6
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Gabus

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	WUWUR	411	15	2	
2	KARABAN	492	47	7	
3	TLOGOAYU	295	11	3	
4	BOGOTANJUNG	287	20	3	
5	KURYOKALANGAN	309	16	6	
6	GABUS	292	37	8	
7	TANJUNGANOM	556	36	6	
8	SUNGGINGWARNO	320	18	2	
9	PENANGGUNGAN	189	14	2	
10	TAMBAHMULYO	148	14	2	
11	SUGIHREJO	257	25	5	
12	MOJOLAWARAN	100	14	2	
13	SAMBIREJO	189	17	3	
14	PANTIREJO	184	8	2	
15	TANJANG	227	10	2	
16	GEBANG	138	8	2	
17	PLUMBUNGAN	132	12	2	
18	BABALAN	154	10	2	
19	KORIPANDRIYO	125	8	2	
20	SOKO	145	12	2	
21	GEMPOLSARI	246	19	3	
22	BANJARSARI	156	10	2	
23	MINTOBASUKI	145	14	4	
24	KOSEKAN	131	6	2	
	LUAS TOTAL	5627	401	76	

Sumber: Kecamatan Gabus dalam angka 20170

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Gabus memiliki jumlah penduduk sebanyak 60.818 jiwa, yang terdiri dari 30.026 jiwa laki-laki dan 30.792 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Gabus tahun 2016 berjumlah 19.861 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2017 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 10,81 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Gabus digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.7
Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Gabus

NO.	KELOMPOK UMUR	L	%	P	%	JUMLAH	%
1	0 - 4	2.536	4,17	2.241	3,69	4.777	7,86
2	5-10	2.590	4,26	2.207	3,63	4.798	7,89
3	10-14	2.632	4,33	2.276	3,74	4.909	8,07
4	15 - 19	2.355	3,87	2.269	3,73	4.624	7,60
5	20 - 24	2.101	3,45	2.214	3,64	4.315	7,10
6	25 - 29	1.876	3,08	2.107	3,46	3.982	6,55
7	30 - 34	1.925	3,17	2.295	3,77	4.220	6,94
8	35 - 39	2.197	3,61	2.362	3,88	4.559	7,50
9	40 - 44	2.222	3,65	2.162	3,56	4.384	7,21
10	45 - 49	2.063	3,39	2.131	3,50	4.194	6,90
11	50 - 54	1.941	3,19	2.080	3,42	4.021	6,61
12	55 - 59	1.727	2,84	1.718	2,82	3.444	5,66
13	60 - 64	1.462	2,40	1.460	2,40	2.922	4,80
14	65 - 69	975	1,60	1.132	1,86	2.106	3,46
15	70 - 74	685	1,13	949	1,56	1.634	2,69
16	75+	739	1,22	1.190	1,96	1.929	3,17
JUMLAH		30.026	49,37	30.792	50,63	60.818	100

Sumber: Kecamatan Gabus dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Gabus sebagai berikut:

Tabel II.8**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Gabus**

NO	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH	%
1	Tidak/Belum Sekolah	7.048	7.586	14.634	24,06%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.760	3.067	5.827	9,58%
3	Tamat SD/Sederajat	10.181	10.447	20.628	33,92%
4	SLTP/Sederajat	5.007	4.887	9.894	16,27%
5	SLTA/Sederajat	4.209	3.858	8.067	13,26%
6	Diploma I/II	67	119	186	0,31%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	195	264	459	0,75%
8	Diploma IV/Strata I	532	545	1.077	1,77%
9	Strata II	27	18	45	0,07%
10	Strata III	0	1	1	0,00%
	Jumlah	30.026	30.792	60.818	

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Gabus sebagai berikut

Tabel II.9**Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Gabus**

No	Jenis Pekerjaan	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Belum/Tidak Bekerja	7.815	7.508	15.323	25,19%
2	Mengurus Rumah Tangga	6	5.080	5.086	8,36%
3	Pelajar/Mahasiswa	3.729	3.080	6.809	11,20%
4	Pensiunan	106	44	150	0,25%
5	Pegawai Negeri Sipil	235	129	364	0,60%
6	Tentara Nasional Indonesia	41	1	42	0,07%
7	Kepolisian RI	59	2	61	0,10%
8	Perdagangan	204	204	408	0,67%
9	Petani/Pekebun	4.215	4.696	8.911	14,65%
10	Peternak	8	0	8	0,01%
11	Nelayan/Perikanan	35	0	35	0,00%
12	Industri	0	3	3	0,00%
13	Konstruksi	3	1	4	0,01%
14	Transportasi	12	0	12	0,02%
15	Karyawan Swasta	1.878	1.294	3.172	5,22%
16	Karyawan BUMN	30	11	41	0,07%
17	Karyawan BUMD	13	4	17	0,03%

18	Karyawan Honorer	29	24	53	0,09%
19	Buruh Harian Lepas	292	209	501	0,82%
20	Buruh Tani/Perkebunan	705	781	1.486	2,44%
21	Buruh Nelayan/Perikanan	6	1	7	0,01%
22	Buruh Peternakan	1	2	3	0,00%
23	Pembantu Rumah Tangga	0	31	31	0,05%
24	Tukang Cukur	7	1	8	0,01%
25	Tukang Listrik	4	0	4	0,01%
26	Tukang Batu	176	0	176	0,29%
27	Tukang Kayu	198	0	198	0,33%
28	Tukang Las/Pandai Besi	9	0	9	0,01%
29	Tukang Jahit	24	108	132	0,22%
30	Tukang Gigi	1	0	1	0,00%
31	Penata Rias	0	5	5	0,00%
32	Penata Busana	0	2	2	0,00%
33	Penata Rambut	1	4	5	0,01%
34	Mekanik	35	0	35	0,03%
35	Seniman	17	4	21	0,03%
36	Tabib	2	0	2	0,00%
37	Wartawan	1	0	1	0,02%
38	Ustadz/Mubaligh	11	1	12	0,02%
39	Juru Masak	1	6	7	0,01%
40	Dosen	1	7	8	0,01%
41	Guru	134	232	366	0,00%
42	Dokter	5	5	10	0,02%
43	Bidan	0	43	43	0,07%
44	Perawat	18	31	49	0,00%
45	Apoteker	0	3	3	0,00%
46	Pelaut	8	0	8	0,01%
47	Peneliti	5	0	5	0,26%
48	Sopir	156	0	156	0,26%
49	Pialang	0	3	3	0,00%
50	Paranormal	0	1	1	2,68%
51	Pedagang	778	853	1.631	2,68%
52	Perangkat Desa	179	38	217	0,36%
53	Kepala Desa	16	6	22	0,00%
54	Wiraswasta	8.816	6.335	15.151	24,91%
55	Lainnya	0	0	0	0,00%

60.818

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Gabus sebagai berikut:

Tabel II.10**Jumlah Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Gabus**

NO	AGAMA	L	P	JUMLAH	%
1	Islam	29.901	30.649	60.550	99,56
2	Kristen	74	90	164	0,27
3	Katholik	47	48	95	0,16
4	Hindu	0	0	0	0,00
5	Budha	0	1	1	0,00
6	Konghuchu	0	0	0	0,00
7	Aliran Kepercayaan	4	4	8	0,01
JUMLAH		30.026	30.792	60.818	100

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan**2.3.1. Kinerja Pelayanan**

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Gabus didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Gabus dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.11**Angka Kriminabilitas di Kecamatan Gabus**

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	na	na	na	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	na	na	na	0	1
3	Jumlah kejahatan seksual	na	na	na	0	0
4	Jumlah kasus penganiayaan	na	na	na	4	3
5	Jumlah kasus pencurian	na	na	na	15	13
6	Jumlah kasus penipuan	na	na	na	2	1
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	na	na	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	na	na	21	18
9	Jumlah penduduk	na	na	na	60.693	60.818
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	na	na	3,46	2,96

(Rumus Angka Kriminabilitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Gabus dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12**Data Poskamling di Kecamatan Gabus**

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	WUWUR	1	1	2
2	KARABAN	2	3	5
3	TLOGOAYU	1	2	3
4	BOGOTANJUNG	1	3	4
5	KURYOKALANGAN	1	2	3
6	GABUS	3	8	11
7	TANJUNGANOM	2	7	9
8	SUNGGINGWARNO	1	3	4
9	PENANGGUNGAN	1	2	3
10	TAMBAHMULYO	1	2	3
11	SUGIHREJO	2	3	5
12	MOJOLAWARAN	1	1	2
13	SAMBIREJO	1	2	3
14	PANTIREJO	1	2	3
15	TANJANG	1	2	3
16	GEBANG	1	1	2
17	PLUMBUNGAN	1	2	3
18	BABALAN	1	3	4
19	KORIPANDRIYO	1	3	4
20	SOKO	1	3	4
21	GEMPOLSARI	1	4	5
22	BANJARSARI	1	3	4

23	MINTOBASUKI	1	2	3
24	KOSEKAN	1	1	2
	Jumlah	29	65	94

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut: (Linmas) di Kecamatan Gabus

Tabel II.13

Data Anggota Linmas di Kecamatan Gabus

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	WUWUR	9	13	22
2	KARABAN	12	16	28
3	TLOGOAYU	8	9	17
4	BOGOTANJUNG	10	16	26
5	KURYOKALANGAN	9	13	22
6	GABUS	11	15	26
7	TANJUNGANOM	10	15	25
8	SUNGGINGWARNO	8	14	22
9	PENANGGUNGAN	8	10	18
10	TAMBAHMULYO	9	14	23
11	SUGIHREJO	11	16	27
12	MOJOLAWARAN	8	10	18
13	SAMBIREJO	8	15	23
14	PANTIREJO	7	10	17
15	TANJANG	7	13	20
16	GEBANG	6	9	15
17	PLUMBUNGAN	7	11	18
18	BABALAN	7	10	17
19	KORIPANDRIYO	8	11	19
20	SOKO	7	13	20
21	GEMPOLSARI	7	10	17
22	BANJARSARI	7	13	20
23	MINTOBASUKI	8	11	19
24	KOSEKAN	6	9	15
	Jumlah	198	296	494

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Gabus periode 2012-2017 sebagai berikut.

Tabel II.14
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GABUS
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4,8		6	5,8	5,5	5,4	4,8	5,24	4,64	4,12	3,46	2,96	1,15	1,25	1,33	1,56	1,62
2	Jumlah pos kamplang aktif dibagi jumlah pos kamplang yang ada x 100%		40		28	30	33	36	40	25	27	28	29	30	0,89	0,90	0,85	0,81	0,75
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		50		42	44	46	48	50	39	41	42	44	45	0,93	0,93	0,91	0,92	0,90
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		45		25	30	35	40	45	22	26	30	35	40	0,88	0,87	0,86	0,88	0,89
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		5		3	3,5	4	4,5	5	3	4	5	5	6	1	1,14	1,25	1,11	1,2

7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40	25	27	30	35	40	20	22	24	27	30	0.80	0.81	0.80	0.77	0.75
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100	100	100	100	100	100	98	99	100	100	100	0,98	0,99	1	1	1
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	5	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	60	43	45	50	55	60	41	43	45	48	52	0.95	0.96	0.90	0.87	0.87
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	70	50	55	60	65	70	44	47	50	55	60	0.88	0.85	0.83	0.85	0.86
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100	95	96	97	100	100	92	94	96	98	100	0.97	0.98	0.99	0.98	1.00
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	95	96	97	99	100	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	65	45	50	55	60	65	38	40	42	46	50	0.84	0.80	0.76	0.77	0.77
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	95	82	83	85	90	95	78	80	82	83	88	0.95	0.96	0.96	0.92	0.93

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Gabus sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2015 dan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gabus sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.15

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GABUS
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	77.800	65.430	65.400	85.360	25.680	77.800	65.427	65.400	85.360	23.555	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	-13,84	-14,46
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0	29.000	30.809	19.079	19.043	0	28.945	30.809	19.079	19.008		1,00	1,00	1,00	1,00	-8,01	-8,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	21.148	14.823	5.291	0	9.403	21.148	14.680	5.291	0	9.403	1,00	0,99	1,00		1,00	-48,55	-48,64
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	19.577	27.049	30.938	20.446	20.446	19.577	25.538	30.853	20.446	20.446	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00	4,66	4,38
Program pemberdayaan masyarakat	12.000	12.000	18.000	18.000	23.991	12.000	12.000	18.000	18.000	23.991	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,82	20,82

untuk menjaga ketertiban dan keamanan																	
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan	8.125	8.125	12.600	12.600	12.600	8.125	8.125	12.600	12.600	12.600	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,77	13,77
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	9.900	9.900	10.485	5.585	5.581	9.900	9.900	10.485	5.585	5.581	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Program perencanaan pembangunan daerah	11.620	14.117	14.375	13.339	15.339	11.620	14.117	14.375	13.339	15.289	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,78	7,68
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0	0	14.930	1.609	1.621	0	0	14.930	1.609	1.621			1,00	1,00	1,00	-22,12	-22,12
Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik	0	47.500	10.695	8.195	62.190	0	47.500	10.695	8.195	60.445		1,00	1,00	1,00	0,97	139,50	134,18

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	0	0	13.970	1.500	2.100	0	0	13.870	1.500	2.100			0,99	1,00	1,00	-12,32	-12,30
NON URUSAN																	
Program pelayanan administrasi perkantoran	104.565	115.296	123.538	136.261	146.753	103.902	114.581	120.852	133.645	130.990	0,99	0,99	0,98	0,98	0,89	8,85	6,09
Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	37.825	32.682	89.088	58.500	86.730	37.825	32.682	88.191	57.357	84.782	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	43,23	42,28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.850	12.850	14.000	15.750	15.750	12.850	12.250	14.000	15.750	14.850	1,00	0,95	1,00	1,00	0,94	5,36	4,10

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gabus

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Gabus merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gabus kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.